



Pontianak Raih Predikat WTP Ketiga

■ Telusuri Piutang PBB Rp 62 Miliar

PONTIANAK, TRIBUN - Pemerintah Kota Pontianak untuk ketigakalinya meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan dari BPK RI Kalbar. Senin (2/6), Wali Kota Pontianak Sutarmidji menerima hasil pemeriksaan di Kantor BPK RI Kalbar.

Selain Pontianak, Kabupaten Landak juga mendapat predikat WTP pada 2014 ini.

Kepala Sub Auditoriat BPK RI Pontianak Joni Rindra Putra menjelaskan, secara keseluruhan ada tujuh daerah

“Piutang itu PBB, itu pusat diserahkan ke kita. Nah, di situ ada tunggakan Rp 62 miliar. Ini yang paling berat sehingga kami harus memvalidasi kebenaran, apakah bisa ditagih atau tidak.”

SUTARMIDJI
Wali Kota Pontianak

yang laporan keuangan di audit BPK.

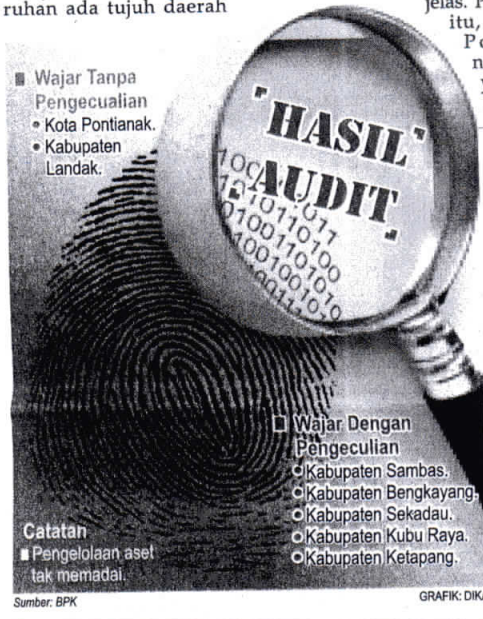
“Dua kita berikan WTP dengan paragraf penjelasan. Pertama itu, Kota Pontianak dan yang kedua

Kabupaten Landak,” ujar Joni kepada wartawan.

Lima daerah lainnya, yakni Sambas, Bengkayang, Sekadau, Kubu Raya dan Ketapang diberi predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

“Itu umumnya yang bermasalah.”

■ Bersambung ke Hal. 15



- Wajar Tanpa Pengecualian
- Kota Pontianak.
- Kabupaten Landak.

- Wajar Dengan Pengecualian
- Kabupaten Sambas.
- Kabupaten Bengkayang.
- Kabupaten Sekadau.
- Kabupaten Kubu Raya.
- Kabupaten Ketapang.

Catatan
■ Pengelolaan aset tak memadai.

Sumber: BPK

GRAFIK: DIKA



Pontianak Raih Predikat WTP Ketiga

Sambungan Hal. 9

salah aset. Rata-rata pengelolan aset di kabupaten masih perlu ditingkatkan dan belum memadai. Kita beri pengencualan, karena dari hal lain belum bisa kita nilai kewajarannya," tuturnya.

Joni mengatakan, kendala aset ini justru menjadi beban pihaknya. "Padahal kita sudah menyampaikan masalah aset ini, tolonglah ditindaklanjuti. Kenyataannya, realita yang kita temukan sering tidak ditindaklanjuti. Terkadang kami sendiri agak kecewa dengan teman-teman. Padahal kita sudah memberikan semacam koridor, ini loh yang harus dilakukan. Kita minta kepada mereka membentuk tim inventarisasi. Tapi kenyataannya banyak yang tidak mereka lakukan. Padahal, permasalahan banyak berkaitan dengan administrasi," katanya.

Dari administrasi, lanjutnya, berpengaruh terhadap penyaj

jian tata keuangan. Sedangkan untuk kedua daerah yang meraih WTP masih ada tenggang waktu dua bulan untuk melengkapi kekurangan.

"Kalau bisa secepatnya. Ada 60 hari tindak lanjut yang harus dilakukan. Memang tidak harus selesai 60 hari, paling tidak ada progresnya. Kita akui tidak bisa semudah membalikkan telapak tangan, tapi ada prosesnya. Proses itu kita nilai apakah sudah cukup memadai apa belum," paparnya.

Dikatakan Joni, pertimangan memberikan predikat WTP dilihat dari segi asetnya yang sudah cukup memadai. Aset, kata Joni, boleh dikatakan kekayaan terbesar yang ada di pemerintah daerah.

"Memang kita akui tidak seluruhnya 100 persen memadai. Masih ada hal-hal yang belum memadai, tapi ada batasan-batasannya. Tidak mesti 100 persen, tapi masih dalam

batas toleransi," lanjutnya.

Wali Kota Pontianak Sutarmidji mengaku berat atas predikat WTP ketiga kalinya ini.

"Sebenarnya yang ketiga ini agak berat. Karena, pertama ruang lingkup audiknya semakin luas; kemudian anggaran yang digunakan semakin besar. Jadi, mempertahankan WTP itu berat. Bahkan tahun ini ada beban kami sehingga kualitasnya sedikit berkurang dibandingkan yang lalu," ujarnya.

Meski diberikan predikat WTP, Pontianak masih memiliki catatan piutang. "Piutang itu PBB, itu pusat diserahkan ke kita. Nah, di situ ada tunggakan Rp 62 miliar. Ini yang paling berat sehingga kami harus memvalidasi kebenaran, apakah bisa ditagih atau tidak," paparnya.

Memvalidasi objek dan subjek pajak yang besar jumlahnya ini yang ia rasakan cukup sulit. "Apalagi tenaga kita tidak tersedia banyak, su-

dah pensiun. Kemudian moralitas pegawai, tidak bisa terima pegawai untuk akuntansi. Kemudian masalah aset pusat juga yang belum jelas ke kita," tuturnya.

Sutarmidji memaparkan permasalahan yang dialami misalnya rumah susun yang sudah harus dioperasikan namun sampai saat ini masih menjadi aset pusat dan belum diserahkan. Kemudian Perda tentang penyerahan aset kota ke PDAM. "Itu masih dalam proses di dewan, tapi sudah," ucapnya.

Ia yakin ke depan predikat WTP yang diraih semakin berkualitas baik. "WTP itu kan dengan catatan, kita berupaya tahun depan WTP tanpa catatan," katanya.

Sedangkan permasalahan aset, jelas Midji, terkait pada penyajiannya. "Ada SKPD yang asetnya ada pada dia, tapi tidak dicatat dalam inventaris aset," pungkasnya. (qky)